

Implikasi Hukum Asuransi Pada Transaksi Bisnis Analisis Terhadap Peraturan Dan Kepatuhan

“Fira Fadhila Siregar, Nayla Aliffa Nakita, M.Ichsan Febriyansah, Fajriawati”

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

e-mail : firafadhillahsiregar@gmail.com

kelas : 2/B-1 Pagi

ABSTRACK

Along with the development of technology and information in the world, various new things appear within our daily life. One of them is the concept of buying and selling online via the internet with using e-commerce. With e-commerce, the traditional buying and selling concept brings together buyers and selling in one room has changed to the concept of long distance buying and selling or telemarketing. As is This concept, of course, both sellers and buyers will feel profitable, because of the buying and selling transactions that occur can be done 24 hours a day without being limited by certain regions. But apart from giving advantages, of course the concept of buying and selling long distance via e-commerce can also pose many risks losses, one of which is a cyber crime attack which can cause misuse of the parties' data in e-commerce resulting in losses. specifically in Indonesian laws and regulations. The research method used in writing this scientific article is method Normative legal research which aims to find a clear legal basis in placing the issues raised, in the perspective of the Commercial Code, especially those related to the issue of implementing insurance in e-commerce transactions. Based on the discussion of the research results, it is revealed that from the meaning of and restrictions on insurance in the Commercial Code, e-commerce transactions are objects that can be insured, because all activities in e-commerce transactions can cause loss or damage to the parties involved

Keyword : implementation of business trade law, compliance, regulations

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di dunia, berbagai hal baru muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah konsep jual beli secara online melalui internet dengan menggunakan e-commerce . Dengan e-commerce konsep jual beli tradisional yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu ruangan berubah menjadi konsep jual beli jarak jauh atau telemarketing. Dengan adanya konsep ini, tentu saja baik penjual dan pembeli akan merasa diuntungkan, karena transaksi jual beli yang terjadi dapat dilakukan 24 jam penuh dengan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Akan tetapi selain memberikan keuntungan, tentu saja konsep jual beli jarak jauh melalui e-commerce juga dapat menimbulkan banyak risiko kerugian, salah satunya adalah serangan cyber crime yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data para pihak dalam e-commerce sehingga mengalami kerugian. secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan Artikel ilmiah ini adalah metode Penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan yang diangkat, dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

Kata Kunci : Implementasi Hukum dagang bisnis ,kapatuhan, peraturan

PENDAHULUAN

Penggunaan asuransi telah diatur didalam pasal 37 ayat (1) peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.35 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.16 tahun 2015 tentang cara penggunaan tenaga kerja asing (Permenker 35/2015) selain syarat-syarat lain nya seperti yang diatur oleh pihak imigrasi. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga agar keberadaan tenaga kerja asing tidak menjadi ancaman. Selain regulasi pokok pemerintah perlu mempertimbangkan banyak pembatasan tenaga kerja asing dari sektor kemampuan dan posisi minimal, pendidikan, batas waktu bekerja di Indonesia perlu diatur dengan ketat.

(Fajriawati, 2018)Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bisnis dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun, bisnis juga dapat memberikan dampak negatif, seperti merusak lingkungan, menipu konsumen, dan melanggar hak asasi manusia. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, praktik bisnis yang dijalankan oleh perusahaan harus mencakup aspek etika bisnis yang baik dan benar. Etika bisnis dan hukum bisnis adalah dua aspek yang saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan dalam dunia bisnis (Panggabea. Praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab menjadi semakin penting dalam konteks bisnis saat ini. Etika bisnis melibatkan pertimbangan moralitas dalam pengambilan keputusan bisnis, sementara hukum bisnis melibatkan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis. Implementasi hukum bisnis yang baik dan praktik bisnis yang etis menjadi hal yang penting dalam mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi yang sehat di Indonesia, etika bisnis adalah suatu aspek yang terkait dengan tindakan moral dalam kegiatan bisnis. Hal ini diperlukan untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

KAJIAN PUSTAKA

Implikasi Hukum Bisnis terhadap Praktik Etika Bisnis:

(Rohid, 2024) Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia. Hukum bisnis, sebagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk praktik bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang diterima dalam masyarakat (Pratiwi & Kurniawan, 2022). Implikasi ini mencakup dampak positif atau negatif yang timbul akibat penerapan atau pelanggaran hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia (Arifiyani & Sukirno, 2012).

1. Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia:

- Undang-Undang (UU) tentang Persaingan Usaha yang mengatur

praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, kolusi, dan praktik yang merugikan konsumen.

- UU Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen dan mendorong praktik bisnis yang jujur dan transparan.
- UU tentang Penanaman Modal yang mengatur investasi dan bisnis asing di Indonesia, termasuk aspek etika dalam pengelolaan lingkungan dan tenaga kerja.
- UU tentang Ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja dan mendorong praktik kerja yang adil dan manusiawi.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility):

- Hukum Bisnis memberikan kerangka hukum untuk tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, seperti kewajiban perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
- Implementasi CSR yang baik dapat mempengaruhi praktik etika bisnis, meningkatkan reputasi perusahaan, dan membangun hubungan yang baik dengan stakeholder.

3. Perlindungan Kekayaan Intelektual:

- Hukum Bisnis melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, yang berkontribusi pada praktik bisnis yang inovatif dan etis.
- Perlindungan kekayaan intelektual mendorong perusahaan untuk melindungi karya kreatif mereka, mencegah pelanggaran hak cipta, dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab.

(Arum & Yusuf, 2024)Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi hukum bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis yang efektif adalah beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mencapai praktik bisnis yang etis. Pengembangan hukum bisnis yang lebih baik dan implementasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong partum(Ibrahim, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research atau penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisis dan disusun menjadi laporan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia. Implikasi hukum bisnis dapat berdampak baik maupun buruk terhadap praktik etika bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami hubungan antara hukum bisnis dan etika bisnis di Indonesia serta implikasinya terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia bisnis, hukum bisnis memainkan peran penting dalam membentuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, hukum kontrak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis karena mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis implikasi dari hukum bisnis, terutama dalam konteks hukum kontrak, terhadap praktik etika bisnis di Indonesia. Teori dan pandangan (Salim, 2003) dalam bukunya "Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak" akan diaplikasikan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara hukum bisnis dan etika bisnis.

Tabel 1
Peran Hukum Bisnis Dalam Praktek bisnis

Teori Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis	Teori hukum bisnis	Teori tanggung jawab
<p>kepatuhan terhadap hukum kontrak adalah hal yang esensial dalam praktik bisnis yang etis. Kontrak adalah kesepakatan hukum antara pihak-pihak yang berlaku secara sah dan mengikat, sehingga patuh pada kontrak adalah wujud dari etika bisnis yang baik. Implikasinya, para pelaku bisnis di Indonesia harus memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak dengan cermat</p>	<p>pentingnya perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis. Prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik bisnis di Indonesia dengan memastikan bahwa kontrak tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks etika bisnis, transparansi dalam penyusunan kontrak juga dijunjung tinggi untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan dan menjaga</p>	<p>Memberikan kerangka hukum yang jelas: Hukum bisnis menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Dengan adanya hukum bisnis yang jelas, pelaku bisnis dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, serta batasan dan persyaratan yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi bisnis</p>
<p>Melindungi kepentingan semua pihak: Hukum bisnis melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk perusahaan, pemegang saham, karyawan, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Hukum bisnis memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan mendapatkan</p>	<p>Menjaga integritas dan kredibilitas bisnis: Hukum bisnis juga berperan dalam menjaga integritas dan kredibilitas bisnis. Dengan adanya aturan hukum yang mengatur transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perusahaan, praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab dapat ditegakkan. Hal ini berkontribusi pada membangun citra positif perusahaan dan memperoleh</p>	<p>. Mengatasi pelanggaran dan sengketa bisnis: Hukum bisnis juga berfungsi untuk menangani pelanggaran dan sengketa bisnis yang mungkin terjadi. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan menghindari konflik yang</p>

perlindungan hukum yang setara	kepercayaan dari para pemangku kepentingan	merugikan semua pihak.
--------------------------------	--	------------------------

Perkembangan pembangunan nasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan hukum bisnis dalam praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia. Dalam konteks ini, perubahan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih baik, sehingga mendukung perkembangan dunia bisnis Indonesia secara keseluruhan. (Indriani, 2019). Etika bisnis juga menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan hukum bisnis dalam praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia. Praktik bisnis yang berlandaskan pada prinsip etika akan melindungi perusahaan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu dan entitas bisnis yang tidak bertindak secara etis. (Juliana et al., 2014) Selain itu, faktor-faktor internal dan eksternal juga memengaruhi pelaksanaan hukum bisnis dalam praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia. Faktor internal meliputi kebijakan perusahaan, sumber daya manusia, dan budaya organisasi, sementara faktor eksternal melibatkan regulasi pemerintah, tuntutan konsumen, dan persaingan bisnis. Kesadaran hukum juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum bisnis dalam praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia. Kesadaran hukum membantu para pelaku bisnis untuk memahami aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan bisnis mereka dan menghindari pelanggaran hukum yang dapat berdampak negative.

KESIMPULAN

Penguatan regulasi dan pengawasan: Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur hukum bisnis dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaannya. Hal ini meliputi penyempurnaan undang-undang yang ada, pembentukan kebijakan yang mendukung praktik bisnis yang etis, serta penguatan lembaga pengawas yang independent sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang efektif: Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum bisnis dan pelanggaran etika bisnis. Sistem peradilan harus efisien, transparan, dan dapat menjamin keadilan bagi semua pihak. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan instansi terkait juga penting dalam mengatasi pelanggaran hukum bisnis.
2. Pendidikan dan kesadaran tentang etika bisnis: Pendidikan dan pelatihan tentang etika bisnis harus ditingkatkan baik di tingkat pendidikan formal maupun melalui program-program pelatihan dan pengembangan profesional. Hal ini akan membantu menciptakan budaya bisnis yang bertanggung jawab dan etis di kalangan pelaku bisnis.
3. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia bisnis: Pemerintah perlu menjalin kerja sama erat dengan dunia bisnis untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan transparan. Keterlibatan aktif perusahaan dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat meningkatkan praktik .

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyani, H. A., & Sukirno, S. (2012). Pengaruh pengendalian intern, kepatuhan dan kompensasi manajemen Terhadap perilaku etis karyawan (studi kasus PT Adi satria abadi Yogyakarta). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–21.
- Arum, D. W., & Yusuf, H. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DICANTUMKANNYA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1405–1413.
- Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Ibrahim, K. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah [Mudharabah Principle Of Banking Products]. *Jurnal Ius*, 2.
- Rohid, D. (2024). Implikasi Hukum Dari Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Bisnis Di Indonesia. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).